



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 180/0002598 TAHUN 2022
TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR
JAWA TENGAH TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Kepala Daerah kepada perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi untuk dilakukan pembahasan;
- b. bahwa dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi dan guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan kepala daerah dimaksud, perlu ditetapkan perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/062/OTDA tanggal 5 Januari 2021 perihal Implementasi Sistem Fasilitasi Peraturan Daerah Berbasis Elektronik (e-Perda);
 2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0000152 tanggal 4 Januari 2022 perihal Program Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Program Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2022, dengan rincian Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2022.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,



SALINAN: Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;

6. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
18. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah;
19. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah;
20. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah;
21. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah;
22. Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah;
23. Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
24. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 186/0002598 TAHUN 2022
 TENTANG
 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR
 JAWA TENGAH TAHUN 2022

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2022

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Perangkat Daerah Pemrakarsa	Keterangan
1	2	3	4
A. Rancangan Peraturan Gubernur ajuan Perangkat Daerah			
1.	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu, Data Dan Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi Dan Diskriminasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Amanat/tindak lanjut Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan.
2.	Sistem Dan Mekanisme Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Biro Organisasi	-
3.	Pakaian Dinas Khusus Operasional Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah		-
4.	Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah		-
5.	Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah		-
6.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik		-
7.	Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Badan Riset Daerah Provinsi Jawa Tengah		-

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Perangkat Daerah Pemrakarsa	Keterangan
1	2	3	4
8.	Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah		-
9.	Pelaksanaan <i>Core Values</i> Ber-Akhlak dan <i>Employer Branding</i> Bangsa Melayani Bangsa		-
10.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Publik Pada Provinsi Jawa Tengah	Dinas Komunikasi dan Informatika	<p>a. Secara filosofi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mengatur tentang proses komunikasi sebagai bagian dari kebijakan dan bentuk pelayanan informasi publik; 2) menjamin kebutuhan atau hak informasi masyarakat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 f Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3) selain itu komunikasi merupakan bagian dari urusan konkuren pemerintah daerah sebagaimana amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 4) mewadahi aspek informasi dan komunikasi publik secara makro sebagai bentuk layanan yang harus diimplementasikan pemerintah daerah yang selama ini belum pernah diatur dalam regulasi.

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Perangkat Daerah Pemrakarsa	Keterangan
1	2	3	4
			<p>b. Secara yuridis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Wewenang kepala daerah untuk menerbitkan regulasi / peraturan kepala daerah sesuai kuasa peraturan perundang-undangan sebagai amanat pasal 246 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 2) menjelaskan pelaksanaan Inpres RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik; 3) pelaksanaan Perda Jateng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah, dari sisi komunikasi; 4) implementasi kerja dari amanat Peraturan Daerah Jateng Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, khususnya perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi; 5) penjabaran Permenkominfo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika di daerah;

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Perangkat Daerah Pemrakarsa	Keterangan
1	2	3	4
			<p>6) adopsi PermenpanRB Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah, Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan yang diadopsi untuk Menyusun survei kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi dan komunikasi publik;</p> <p>7) mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Lembaga Komunikasi Sosial yang sudah tidak relevan dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan.</p> <p>c. Secara sosiologis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) regulasi ini bermanfaat untuk memberikan kejelasan terkait pembentukan lembaga komunikasi masyarakat dan komunitas di Jawa Tengah; 2) menjadi pedoman pelaksanaan publikasi Pemerintah daerah melalui beragam media massa dan media interpersonal, dengan strategi konten informasi, pilihan media dan sebagainya;

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Perangkat Daerah Pemrakarsa	Keterangan
1	2	3	4
			<p>3) dasar penyusunan kegiatan informasi dan komunikasi publik, seperti pelaksanaan analisis informasi dan penanggulangan misleading informasi;</p> <p>4) acuan bagi kabupaten/kota untuk membuat dan melaksanakan kegiatan layanan informasi dan komunikasi publik,</p> <p>5) pedoman pelaksanaan evaluasi layanan informasi dan komunikasi publik melalui survei kepuasan masyarakat;</p> <p>6) urusan komunikasi menjadi urusan yang strategi dalam setiap RPJMD dan menunjang pencapaian urusan lainnya.</p>
11.	Penyelenggaraan SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Tengah		-
12.	Pejabat Pemerintah Pengelola Teknologi Informasi (GCIO) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah		-
13.	Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Tengah		-
14.	Satu Data Jawa Tengah		untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
15.	Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah		-

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Perangkat Daerah Pemrakarsa	Keterangan
1	2	3	4
16.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah		untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 17 ayat (6), Pasal 19 ayat (3), Pasal 27, Pasal 29 dan Pasal 36 ayat (7) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah
17.	Jawa Tengah <i>Corporate University</i>	Badan Pengembangan Sumber Daya Manuasia Daerah	Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang mendukung tercapainya tugas pokok dan fungsi organisasi, perlu dikembangkan fungsi Learning System (LS) dan Learning Organization (LO) yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif melalui Jawa Tengah <i>Corporate University</i> .
18.	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	a. Menyesuaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; b. Proses sudah dalam tahap penandatanganan Gubernur Jawa Tengah
19.	Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah		
20.	Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelaporan Realisasi Penanaman Modal Sektor Usaha Mikro Dan Kecil Di Provinsi Jawa Tengah		a. Menyesuaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; b. Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No. 1	Judul Rancangan Peraturan Gubernur 2	Perangkat Daerah Pemrakarsa 3	Keterangan 4
21.	Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Amanat Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Provinsi Jawa Tengah
22.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Identitas Kreasi Jawa Tengah, Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, Inkubator Ekonomi Kreatif, Insentif, Pendanaan, Penghargaan, Pengawasan dan Pengendalian serta Tata Cara Penghentian Dan Pengalihan)		Amanat Pasal 23, Pasal 46, Pasal 52, Pasal 56, Pasal 58, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Provinsi Jawa Tengah
23.	Pedoman Penerapan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah	Biro Perekonomian	Pengaturan untuk semua BUMD Provinsi Jawa Tengah terkait pedoman pengelolaan perusahaan
24.	Pembubaran Dan Likuidasi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Klaten		Pelaksanaan amanat dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah
25.	Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Khusus Operasional di Lingkungan Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Tengah	Rumas Sakit Umum Daerah Tugurejo	Perubahan isi disesuaikan dengan kesepakatan RSUD/RSJD Provinsi Jawa Tengah

No. 1	Judul Rancangan Peraturan Gubernur 2	Perangkat Daerah Pemrakarsa 3	Keterangan 4
26.	Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2016 tentang Renumerasi Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah		
27.	Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah		
28.	Penatausahaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah		Baru (isi disesuaikan dengan kesepakatan RSUD/RSJD Provinsi Jawa Tengah).
29.	Badan Akun Standar Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah		
30.	Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.	Satuan Polisi Pamong Praja	Amanat Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
31.	Pembentukan dan Kelembagaan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat.		Amanat Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No. 1	Judul Rancangan Peraturan Gubernur 2	Perangkat Daerah Pemrakarsa 3	Keterangan 4
32.	Tata Cara Pemberian Penghargaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat		Amanat Pasal 38 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
33.	Sistem Informasi Pelaporan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.		Amanat Pasal 39 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
34.	Besaran dan Tata Cara Pemberian Tunjangan Resiko dan Insentif kepada Polisi Pamong Praja dan PPNS pada SATPOL PP Provinsi Jawa Tengah.		<p>1. Amanat Pasal 41 ayat (3) dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;</p> <p>2. Amanat Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</p>
35.	Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Pelanggaran Peraturan Daerah.		Amanat pasal 47 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
36.	Standar Operasional Prosedur SATPOL PP Provinsi Jawa Tengah.		Perlu melakukan revisi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2013 tentang SOP SATPOL PP Provinsi Jawa Tengah, karena sudah tidak relevan dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014.

No. 1	Judul Rancangan Peraturan Gubernur 2	Perangkat Daerah Pemrakarsa 3	Keterangan 4
37.	Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2030	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Rapat persiapan sudah dilaksanakan dengan mengundang Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah tanggal 20 Desember 2021, saat ini proses revisi draft Rapergub.
38.	Pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Pergub Perubahan karena adanya penyesuaian payung hukum yang digunakan Peraturan Gubernur masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 yang dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 dan adanya penambahan tugas OKKPD dalam melaksanakan pengawasan di peredaran sesuai Permentan Nomor 53/201
39.	Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, memberikan ruang untuk mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah; b. terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; c. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas pelayanan publik, administrasi pemerintahan dan pembangunan serta agar terwujudnya tertib administrasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

No. 1	Judul Rancangan Peraturan Gubernur 2	Perangkat Daerah Pemrakarsa 3	Keterangan 4
40.	Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah		<p>di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu mengatur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara Terhadap Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Di Instansi Pemerintah. Sehingga Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2016 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai dan perlu dibuat Peraturan Gubernur yang baru tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah</p>
41.	Peraturan Gubernur Tentang Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah		<p>a. pelaksanaan dari peraturan yang lebih tinggi (SE Menpan Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Kompetensi Bagi PNS Melalui Jalur Pendidikan);</p> <p>b. Sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2010 jo. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

No. 1	Judul Rancangan Peraturan Gubernur 2	Perangkat Daerah Pemrakarsa 3	Keterangan 4
			2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Izin Belajar, Penggunaan Gelar Akademik dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
42.	Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi Jawa Tengah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sebagai upaya perlindungan dan pengamanan arsip dinamis sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada aspek ketatalaksanaan
43.	Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah	Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah	Revisi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2016
44.	Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Pelaksanaan/amanat dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan
45.	Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah	Peraturan Internal RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2015, dipandang masih terdapat kekurangan sehingga perlu menetapkan kembali Peraturan Internal Rumah Sakit yang baru.

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Perangkat Daerah Pemrakarsa	Keterangan
1	2	3	4
46.	Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah	Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah	
47.	Pangkat Badan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah		Usulan Rancangan Peraturan Bersama untuk RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah.
48.	Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini
49.	Perjalanan Dinas		Amanat dari Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
50.	Pedoman Pelaksanaan AMPD Tahun 2021		
51.	Pedoman Pengelolaan Rekening Bendahara SKPD dan BLUD di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah		
52.	Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada APBD Provinsi Jawa Tengah		Tindak lanjut dari : a. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017; b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
53.	Peraturan Internal Korporasi/Institusi (<i>Corporate By Laws</i>) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah	dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah dan sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

No. 1	Judul Rancangan Peraturan Gubernur 2	Perangkat Daerah Pemrakarsa 3	Keterangan 4
54.	Perencanaan Pengawasan Di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	Inspektorat	<p>a. dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu, mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana dan guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik;</p> <p>b. menindaklanjuti Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</p>
55.	Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah		melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
56.	Pedoman Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Pembangunan Dan Pengelolaan Rumah Susun
57.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama	Amanat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah

B.	Rancangan Peraturan Gubernur Kumulatif Terbuka
1.	Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Dan Perubahannya
2.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan perubahannya
2.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Dan Perubahannya
3.	Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Dan Perubahannya
4.	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Dan Perubahannya
5.	Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Perubahannya
6.	Pemberian Gaji Dan Tunjangan Ketiga Belas Dan Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Perubahannya

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

